

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Ketua DPRD Sebut Penjelasan Helipad Bupati Ngawur

Gambir, Warta Kota

Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengkritisi pernyataan yang dilontarkan Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi soal keberadaan landasan helikopter atau helipad di Pulau Panjang.

Dalam rapat kerja bersama Komisi A DPRD DKI Jakarta, Senin (11/7/2022) kemarin, Junaedi mengatakan, helipad yang dimaksud untuk menarik wisatawan karena lebih murah menggunakan helikopter ketimbang kapal motor (boat) untuk mencapai Pulau Panjang.

"Sekarang mana ada tarif helikopter lebih murah daripada boat. Cek di aplikasi perjalanan, paling murah itu Rp 5 juta. Itu pun dengan durasi singkat, paling berapa menit. Ngawur, harusnya seorang Bupati paham aturan," ujar Prasetio pada Selasa (12/7/2022).

Selain itu, Pras sapaan karibnya juga menyoroti pengakuan Bupati Junaedi yang mengatakan pembangunan helipad tersebut berasal dari perorangan dengan sebutan corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab perusahaan.

Sebagai pejabat daerah, harusnya

Junaedi mampu membedakan antara pembangunan melalui dana CSR dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

"Saya ini nggak pinter, tapi juga nggak bodoh-bodoh banget. Masak seorang pejabat di DKI tidak tahu CSR itu apa. CSR itu tanggung jawab sosial atau kontribusi yang diberikan perusahaan, perseroan kepada lingkungan sekitar. Mana ada perorangan kasih CSR," ungkap Pras.

Politikus PDI Perjuangan itu kembali menegaskan bahwa setiap pemanfaatan pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu harus sesuai ketentuan. Dengan begitu tentu akan ada syarat-syarat termasuk perizinan yang harus dilalui perorangan atau perusahaan.

"Sekarang gini, lu punya rumah terus dimasukin orang nggak kulonuwun (permisi) tapi langsung saja jualan di teras rumah, apa bisa diterima. Ini pemanfaatan aset loh, masak nggak ada kontribusinya buat PAD kepada pemerintah. Sekarang dia bilang mau usul bikin aturannya, itu setelah saya sidak, lalu kemarin-kemarin kemana saja," ucapnya.

Melihat Keraguan

Sebelumnya Ketua Komisi A DPRD DKI

Jakarta Mujiono mengungkapkan, harus ada regulasi jelas terkait pemanfaatan pulau yang berada di Kabupaten Kepulauan Seribu.

Satu di antaranya adalah kejelasan izin keberadaan landasan helikopter atau helipad di Pulau Panjang.

"Tetapi saya menangkap keraguan dari beberapa jawaban Bupati terkait helipad. Ada bangunan lain tidak disana, akan kita lihat nanti," ujarnya usai menggelar rapat kerja bersama Bupati Kepulauan Seribu di gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin (11/7/2022).

Mujiono menjelaskan, Bupati Kepulauan Seribu Junaedi mengaku keberadaan helipad tersebut hasil dari CSR.

Akan tetapi, Junaedi juga mengatakan CSR yang dimaksud yaitu pemberian perorangan.

"Menyebutkan CSR salah, CSR biasanya ada di yayasan, perusahaan yang mencari keuntungan. Kalau perorangan bukan CSR," ungkapnya.

Mujiono mengatakan, kejelasan perizinan harus ada dalam konteks pemanfaatan aset milik negara, termasuk perubahan peruntukan suatu aset. **(faf)**